

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Umum tentang Pajak	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Prinsip Pemungutan Pajak	15
3. Fungsi Pajak	18
4. Sistem Pemungutan Pajak	19
C. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan (PPh)	20
1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	20
2. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	20
3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	21
4. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	21
5. Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	22
6. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	22
7. Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	23
8. Tarif Pasal 17	23
9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	24
10. Komponen Pengurangan	26
D. Tinjauan Umum tentang Surat Setoran Pajak (SSP)	26
1. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)	26

2.	Jenis Surat Setoran Pajak (SSP).....	27
3.	Tempat Penyetoran Pajak.....	27
4.	Batas Waktu Penyetoran Pajak	27
E.	Tinjauan Umum tentang Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
1.	Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
2.	Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
3.	Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	29
4.	Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).....	30
F.	Pegawai Negeri	30
1.	Pengertian Pegawai Negeri	30
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	30
3.	Jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	31
G.	Tinjauan Umum tentang PMK Nomor: 262/PMK.03/2010.....	31
1.	Gambaran Umum PMK Nomor: 262/PMK.03/2010	31
2.	Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dalam PMK Nomor: 262/PMK.03/2010	32
3.	Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya	33
4.	Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya	39
5.	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya	40
H.	Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011..	41
1.	Gambaran Umum Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011	41
2.	Kewajiban Pemotong Pajak	41
3.	Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan.....	42
I.	Kerangka Pemikiran.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	46
B.	Fokus Penelitian	47
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	48
D.	Sumber Data.....	48
E.	Teknik Pengumpul Data	50
F.	Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pomdam V/Brawijaya Surabaya	52
1. Sejarah Singkat.....	52
2. Lokasi Pomdam V/Brawijaya Surabaya	55
3. Semboyan.....	57
4. Tugas Pokok.....	58
5. Visi dan Misi.....	58
6. Logo dan Lambang	59
7. Struktur Organisasi	63
8. Fungsi.....	64
9. Personel.....	67
10. Penggajian	68
B. Penyajian Data	72
1. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan.....	72
2. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan.....	76
3. Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	79
4. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	80
C. Analisis dan Interpretasi Data	81
1. Analisis Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya	81
2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Disesuaikan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku	83
3. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Disesuaikan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku	84
4. Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Disesuaikan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku	86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Ringkasan Data Pokok APBN 2008-2014 (Triliun Rupiah).....	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2	Tarif Pasal 17	24
Tabel 2.3	Tarif Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2012	24
Tabel 2.4	PTKP Sesuai Status Perkawinan Wajib Pajak	25
Tabel 2.5	Tarif Pasal 17	32
Tabel 2.6	Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri dan Pensiunannya.....	33
Tabel 4.1	Data Personel TNI AD.....	68
Tabel 4.2	Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD	68
Tabel 4.3	Rumus Gross Up Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tahun 2009	74
Tabel 4.4	Perhitungan Gross Up Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Golongan II/C bulan Nopember tahun 2014.....	75
Tabel 4.5	Perhitungan Setelah Dihitung dengan Menggunakan Rumus <i>Gross Up</i>	76
Tabel 4.6	Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Dipotong Oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya tahun 2014	78
Tabel 4.7	Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bulan Nopember 2014	85
Tabel 4.8	Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pomdam V/Brawijaya Surabaya Tahun 2014.....	87

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya	35
Gambar 2.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang Menerima Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan	37
Gambar 2.3	Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan.....	38
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1	Wilayah yang dibawahhi Pomdam V/Brawijaya Surabaya	53
Gambar 4.2	Lapangan Udara Darmo tahun 1920-an	56
Gambar 4.3	Bangunan Kantor Pomdam V/Brawijaya Surabaya	56
Gambar 4.4	Patung Prabu Brawijaya dalam Wujud Harihara dan Sesanti “Bhirawa Anoraga”	57
Gambar 4.5	Logo Kodam V/Brawijaya Surabaya	59
Gambar 4.6	Simbol “Gajah Mada”	61
Gambar 4.7	Struktur Organisasi Pomdam V/Brawijaya Surabaya	63

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Tunjangan Umum dan tunjangan Struktural PNS TNI AD	93
Lampiran 2.	Tunjangan Fungsional	94
Lampiran 3.	Tunjangan Kompensasi Sandi	94
Lampiran 4.	Tunjangan Papua dan Daerah Terpencil.....	97
Lampiran 5.	Keterangan Lainnya.....	98
Lampiran 6.	Dasar Perhitungan Pajak yang Digunakan Pomdam V/Brawijaya Surabaya	99
Lampiran 7.	Skala Gaji PNS Tahun 2014.....	100
Lampiran 8.	Analisis Perhitungan.....	101
Lampiran 9.	Instrumen Penelitian	108
Lampiran 10.	SSP, SPT 1721 dan 1721-A2.....	110
Lampiran 11.	Data Gaji PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya	120
Lampiran 12.	PMK Nomor: 262/PMK.03/2010	123
Lampiran 13.	Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011	132
Lampiran 14.	Surat Riset.....	145
Lampiran 15.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	146
Lampiran 16.	Curriculum Vitae	147

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis* Edisi 3. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh Edisi Revisi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *PPH (Pajak Penghasilan)*. Jakarta : Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang – Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kementrian Keuangan RI.
- Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo
- Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi aksara.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2003. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan & Pembentukan Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Victory Inti Cipta.
- Silalahi, Uber. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press.
- Smith, Adam. 2005. *An Inquiry Into The Nature And Causes of The Wealth of Nations (An Electronic Classic Series Publications)*. Philadelphia: The Pennsylvania State University.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online/Daring”*, diakses pada tanggal 3 Januari 2015 dari <http://kbbi.web.id/>

Nugroho, Erfan. *“Perbedaan Mekanisme, Proses, Tinjauan, Analisis dan Evaluasi”*, diakses pada tanggal 3 Januari 2015 dari <https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/>

Peraturan DJP Nomor: 31/PJ/2012, *“Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi”*, diakses pada 5 Desember 2014 dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/PPh-21-PER-31-Tahun-2012-Pedoman-Teknis-Pemotongan-Penyetoran-Pelaporan.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.011/2012, *“Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak”*, diakses pada 1 Desember 2014 dari <http://bakp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/pmk-162-2012-tentang-ptkp.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, *“Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”*, diakses pada 5 Desember 2014 dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/PPh-21-PMK-262-Tahun-2010-Penghasilan-Bersumber-APBN-APBD.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010, *“Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”*, diakses pada 5 Desember 2014 dari <http://bakp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/PP-80-Tahun-2010.pdf>

Perwira, Putri. *“Teknik Pengumpulan Data”*, diakses pada tanggal 3 Januari 2015 dari http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64796-Analisis%20Hubungan%20Internasional-Teknik%20Pengumpulan%20Data.html

Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008, *“Pajak Penghasilan”*, diakses pada tanggal 6 Desember 2014 dari <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, *“Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian”*, diakses pada tanggal 6 Desember 2014 dari <http://spi.unud.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/UU-8-TH-1974-POKOK-KEPEGAWAIAN.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 “*Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*”, diakses pada tanggal 6 Desember 2014 dari http://itjen.deptan.go.id/berkas_upload/uu%20nomor%2043%20tahun%201999.pdf

Wikipedia indonesia, “Polisi Militer Angkatan Darat”, diakses pada tanggal 18 Februari 2015 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Militer_Angkatan_Darat_Indonesia

